

ISLAM DAN DEMOKRASI: REPRESENTASI DEMOKRASI PASCA PEMILU PADA MEDIA ISLAM

Zakiya Fatihatur Rohma

Mahasiswa Magister Prodi Komunikasi dan Penyiaran
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta.

E-mail: Zakiyafat07@gmail.com

Informasi Artikel:

Dikirim: (03 September 2019) ; **Direvisi:** (26 Oktober 2019); **Diterima:** (08 November 2019)

Publish (19 November 2019)

Abstrak: Islam dan Demokrasi Pasca Pemilu Pada Media Islam. Berdasarkan hasil badan survei nasional Saiful Mujani Research & Consulting (SMRC) pada 20 Mei-1 Juni 2019 terhadap citra demokrasi di Indonesia mengalami penurunan kepercayaan dari masyarakat pasca kerusuhan 22 Mei di depan kantor KPU. Pada Juni 2019 masyarakat yang menyatakan puas dengan demokrasi hanya mencapai 66%. Turunnya kepercayaan masyarakat menyebabkan demokrasi berada pada posisi mengkhawatirkan. Khususnya dengan keberadaan kelompok anti demokrasi yang akan memanfaatkan momen tersebut. Tidak hanya itu, beberapa media massa Islam juga turut melakukan representasi citra demokrasi pasca pemilu. Media massa sendiri dianggap sebagai pilar keempat demokrasi. Karena itu lah penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana representasi media Islam di Indonesia pasca pemilu 2019. Adapun media yang dianalisis adalah media online Nu.or.id dan Voa-islam.com dengan menggunakan metode analisis wacana Norman Fairclough. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedua media online tersebut mempunyai representasi demokrasi yang berbeda sesuai dengan kepentingan dan identitas politik serta identitas kelompok Islam yang dipercaya.

Kata Kunci: Islam, Demokrasi, Media Islam, Analisis Wacana.

Abstract: Judul artikel dalam bahasa Inggris. Based on the results of the National Survey Board Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) on 20th May-1st June 2019 towards the image of democracy in Indonesia decreased trust from the community after the 22nd May riot in front of the KPU office. In June 2019 the community expressed satisfaction with democracy only reaching 66%. Declining public trust lead to democracy in an alarming position especially with the existence of anti-democratic groups who will take advantage of that moment. Besides that, some Islamic mass media also represent the image of democracy. Therefore this research to find out how the representation of Islamic media in Indonesia after the 2019 election. The online media analyzed are Nu.or.id and Voa-islam.com using Norman Fairclough's discourse analysis method. The results showed that the two online media have different representation of democracy in accordance with the interest, political identity and the Islamic group identity.

Key Word: Islam, Democracy, Islamic media, Discourse analysis.

PENDAHULUAN

Kerusuhan 22 Mei yang terjadi di depan kantor KPU berakibat pada citra demokrasi di Indonesia. Berdasarkan hasil badan survei nasional Saiful Mujani Research & Consulting (SMRC) pada 20 Mei-1 Juni 2019 menunjukkan adanya penurunan kepercayaan masyarakat terhadap sistem demokrasi. Pada April 2019 masyarakat yang menyatakan puas terhadap sistem demokrasi mencapai 74%. Namun jumlah tersebut menurun menjadi 66% pada Juni 2019. Sedangkan yang menyatakan tidak puas dengan demokrasi justru meningkat pada Juni 2019, yakni dari 23% (April 2019) menjadi 30% (Juni 2019) (Irwan).

Peristiwa lainnya yang berdampak pada citra demokrasi di Indonesia pasca pemilu 2019 adalah munculnya beberapa asumsi tentang demokrasi dalam sidang sengketa MK (Mahkamah Konstitusi). Salah satu asumsi tersebut adalah dugaan adanya materi yang berjudul "Kecurangan Bagian Demokrasi" yang disampaikan oleh Moeldoko, ketua harian TKN (Tim Kemenangan

Nasional) pasangan calon presiden nomor urut satu (Antony).

Selain peristiwa kerusuhan 22 Mei dan sidang sengketa MK, beberapa media Islam pun terlibat dalam pembentukan citra demokrasi pasca pemilu 2019. Media massa sendiri merupakan arena pertarungan dan perebutan wacana untuk merepresentasikan suatu isu atau peristiwa. Terutama media Islam yang dimiliki oleh beberapa ormas (organisasi masyarakat) di Indonesia, seperti Muhammadiyah, Persis, Nahdlatul Ulama, FPI dan LDII. Dari beberapa ormas tersebut terdapat ormas yang mendukung demokrasi dan yang menolak demokrasi. Menurut Dr. Sri Yunanto (2018: 109) kelompok ormas Islam yang menentang demokrasi terbagi menjadi tiga kelompok. Kelompok pertama, kelompok yang menentang demokrasi namun tidak menjadikan pembentukan negara Islam sebagai tujuan, misalnya FPI dan Laskar Jihad. Kelompok

kedua, kelompok yang menolak demokrasi dan hendak mendirikan negara islam, seperti HTI dan KISDI. Kelompok ketiga, kelompok yang menolak demokrasi dan secara militan atau terbuka memperjuangkan berdirinya negara islam, seperti MMI.

Dua diantara beberapa media islam yang menunjukkan posisi berbeda atas demokrasi adalah Nu.or.id dan Voa-islam.com. Nu.or.id merupakan website resmi ormas Nahdhatul Ulama. Ormas tersebut dikenal sangat militan dalam membela sistem demokrasi dan keutuhan NKRI. Seperti adanya jargon “NKRI Harga Mati” atau terciptanya lagu “Ya Lal Wathan” yang sering dinyanyikan dalam acara-acara formal dan non-formal. Sementara itu, Voa-islam.com merupakan media Islam yang dikelola PT. Visi Media Veteran yang mendasarkan kerja medianya pada Al-Quran. Meskipun voa-islam.com tidak dikelola oleh salah satu ormas di Indonesia namun media tersebut sering mengangkat isu tentang khilafah atau sistem Islam. Bahkan mendukung dalam

pembentukan sistem Islam tersebut. Karena itu, menjadi menarik untuk melihat bagaimana wacana yang diproduksi oleh Nu.or.id dan Voa-islam.com untuk merepresentasi sistem demokrasi di Indonesia pasca pemilu 2019?. Adapun berita atau opini yang akan dianalisis adalah berita yang diposting selama Mei-Juni 2019 menggunakan analisis wacana Norman Fairclough.

LANDASAN TEORI

a. Demokrasi

Demokrasi merupakan sistem politik dan sistem pemerintahan di Indonesia yang masih menjadi polemik di masyarakat. Polemik tersebut salah satunya berupa penolakan sistem demokrasi oleh kelompok Islam tertentu seperti kelompok Hizbut Tahrir yang diwakili oleh Taqiyuddin An Nabhani. Beberapa wacana yang muncul atas penolakan sistem demokrasi diantaranya dianggap sebagai sistem kafir karena berasal dari barat, sistem buatan manusia, berideologi sekuler dan tidak bersumber dari wahyu atau Al-Quran (Rohmah, 2014: 4).

Adapun definisi demokrasi dapat dilihat dari kriteria demokrasi menurut beberapa ilmuwan. Diantaranya adalah Andrew dan Chapman menyatakan enam ciri demokrasi meliputi; hak suara yang luas, pemilihan umum yang bebas dan terbuka, kebebasan berbicara dan berkumpul, penghargaan atas *rule of law*, pemerintah yang bergantung pada parlemen dan badan pengadilan yang bebas. Sementara Ulf Sundhaussen menyatakan tiga ciri demokrasi diantaranya adalah; *pertama*, jaminan atas hak seluruh warga negara untuk dililih dan memilih dalam pemilu yang dilaksanakan secara berkala dan bebas. *Kedua*, semua warga negara menikmati kebebasan berbicara, berorganisasi, memperoleh informasi dan beragama dan *ketiga*, terjaminnya persamaan hak di depan hukum (Zuhro, 2009: 19).

Meskipun kriteria demokrasi yang disampaikan oleh para ahli berbeda-beda, namun terdapat beberapa nilai universal yang sama. Misalnya nilai kesetaraan, kebebasan berpendapat, musyawarah, gotong royong, kebebasan untuk terlibat dalam pemerintahan, kebebasan

dipilih dan memilih serta terjaminnya hak sebagai warga negara di depan hukum.

b. Representasi Media

Setiap berita mempunyai kepentingan tertentu. Menurut Piliang kepentingan yang paling mendominasi adalah kepentingan ekonomi (*economic interest*) dan kepentingan kekuasaan (*power interest*). Kepentingan ekonomi meliputi pemasukan iklan, rating yang tinggi untuk setiap program dan mendapat *viewer* (khusus pada media online) dalam jumlah besar. Sedangkan kepentingan kekuasaan meliputi kemenangan partai politik, memperkuat ideologi atau sistem tertentu dan melakukan kontrol atas suatu kebijakan pemerintahan (Iman, 2010: 117).

Kedua kepentingan tersebut mempengaruhi proses produksi berita dan membentuk isi berita. Sehingga realitas yang muncul adalah realitas yang telah dikonstruksi sesuai kepentingan pihak media. Selain merekonstruksi realitas, untuk mencapai kepentingan media adalah dengan merepresentasikan isu atau peristiwa. Menurut Fiske representasi merupakan cara

membentuk realitas baru dengan cara-cara tertentu sesuai dengan kepentingan dan posisi sosial (Fahmi, 2018: 5).

Alat utama untuk melakukan representasi adalah bahasa. Menurut Alex Sobur bahasa mempunyai kekuatan untuk merepresentasikan realitas dan mempengaruhi makna terhadap realitas yang telah dikonstruksi. Pemilihan gaya bahasa, kosakata, ungkapan, tanda, merupakan strategi dalam melakukan representasi. Pemilihan kosa kata dan kalimat untuk menggambarkan peristiwa tertentu bertujuan untuk mengarahkan persepsi masyarakat supaya sesuai dengan yang diinginkan oleh pihak penerbit berita (Mahdi, 2015: 9).

c. Media Islam

Media massa mempunyai peran sangat penting dalam sistem demokrasi. Menurut Fred S Siebert, "media massa merupakan pilar keempat dari sistem demokrasi selain lembaga yudikatif, eksekutif dan legislatif. Demikian pula pernyataan Agner Fog bahwa media massa merupakan penyangga demokrasi. Media massa mampu menjadi alat menyampaikan pendapat, gagasan,

ide, informasi kenegaraan, bahkan sebagai media musyawarah yang menjadi dasar demokrasi" (2018: 5).

Sedangkan kemunculan istilah media Islam mungkin terdengar seperti merek sebuah produk. Kajian tentang media islam juga belum banyak ditulis. Namun menurut Arismunandar, "ada tiga ciri khusus media massa Islam meliputi dikelola oleh orang islam atau mayoritas umat Islam sebagai pengelolanya, mempunyai visi dakwah atau visi menyebarkan ajaran islam dan menerapkan aturan atau nilai-nilai ajaran Islam dalam menjalankan bisnis media". (2018: 8).

Ciri ciri tersebut yang membedakan media Islam dengan media lain. Adapun media online Nu.Or.Id dan Voa-islam.com telah memenuhi beberapa ciri media islam. Keduanya juga menampilkan representasi dan citra atas sistem demokrasi sesuai dengan landasan, dasar dan ideologi media masing-masing. Sebagai bagian dari pilar demokrasi, media massa tidak hanya menjadi tempat berbagi informasi. Namun juga tempat bertarungnya wacana-wacana termasuk wacana tentang demokrasi.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah analisis wacana model Norman Fairclough. Fairclough menitikberatkan perhatiannya pada bahasa. Menurut Fairclough, "bahasa berfungsi sebagai alat kekuasaan yang membawa ideologi tertentu dari pengguna bahasa. Fairclough juga berpendapat bahwa bahasa berfungsi sebagai praktik sosial". (Eriyanto, 2011: 286-287). Dari pendapat tersebut muncul dua implikasi, meliputi ; Pertama, wacana merupakan bentuk dari tindakan. Kedua, munculnya hubungan timbal balik antara wacana dan struktur sosial. Fairclough pun membagi analisis wacana dalam tiga dimensi, yakni teks, discourse practice dan sociocultural practice. Namun dalam penelitian ini hanya difokuskan pada satu dimensi saja, yakni dimensi teks untuk mengetahui representasi demokrasi pada media online Islam.

Terdapat tiga unsur dalam teks yang dapat dianalisis menurut Fairclough. *Pertama*, representasi. *Kedua*, relasi dan *ketiga* identitas. Representasi menurut Fairclough ingin melihat bagaimana individu,

kelompok atau peristiwa ditampilkan dalam teks melalui tiga hal, yakni representasi dalam anak kalimat, representasi dalam kombinasi anak kalimat dan representasi dalam rangkaian antar kalimat.

1. Representasi dalam anak kalimat

Dalam hal ini pemakai bahasa akan dihadapkan pada dua pilihan. *Pertama*, pada tingkat kosa kata (*Vocabulary*). *Kedua*, pada tingkat tata bahasa (*Grammar*). Pilihan kosa kata berhubungan dengan bagaimana individu, kelompok atau peristiwa dikategorisasikan dalam set tertentu. Hal tersebut juga berhubungan dengan penggunaan metafora. Sedangkan pilihan tata bahasa berhubungan dengan apakah tata bahasa ditampilkan dalam bentuk proses ataukah partisipan.

2. Representasi dalam kombinasi anak kalimat

Menggabungkan dua anak kalimat dapat membentuk koherensi lokal, yakni suatu pengertian yang didapat dari gabungan dua anak kalimat sehingga kalimat tersebut mempunyai makna. Koherensi ini mempunyai tiga bentuk. *Pertama*, elaborasi. Anak kalimat yang satu menjadi penjelas anak kalimat yang

lain. Kedua, perpanjangan. Anak kalimat yang satu menjadi perpanjangan anak kalimat yang lain. Ketiga, mempertinggi/penyebab. Anak kalimat yang satu posisinya lebih tinggi dari pada anak kalimat yang lain.

3. Representasi dalam rangkaian antar kalimat

Aspek yang ketiga lebih berhubungan dengan bagaimana dua kalimat atau lebih disusun atau dirangkai. Representasi lebih berhubungan dengan bagian mana yang lebih ditonjolkan dalam suatu kalimat dibandingkan dengan bagian yang lain. Dalam hal ini apapun yang dipilih untuk ditampilkan oleh media menunjukkan bagaimana kalimat yang berbeda, pendapat yang berbeda dapat digabung dan seakan berhubungan. Hal tersebut dilakukan oleh wartawan dengan menggunakan strategi wacana tertentu.

HASIL PENELITIAN

Konten yang dianalisis dalam website NU.Or.Id pada Mei-Juni 2019 sebanyak 3 berita dan 2 opini. Masing-masing berita berjudul “Ketua NU NTB: Pemilu Pesta

Demokrasi, Jangan Meninggalkan Dendam”, “LKSB: Tujuan Demokrasi adalah Kemakmuran dan Kesejahteraan Rakyat” dan “Gus Yahya: Perusuh Demokrasi Harus Diberantas”. Sedangkan masing-masing opini berjudul “Kekerasan dan Keadaban Politik Kita” dan “Kita Semua adalah Pemenang dalam Pesta Demokrasi”.

Pada berita yang berjudul “Ketua NU NTB: Pemilu Pesta Demokrasi, Jangan Meninggalkan Dendam” terdapat beberapa representasi yang muncul, yakni merepresentasikan pemilu, KPU dan Bawaslu sebagai panitia penyelenggara pemilu 2019. Pemilu direpresentasikan sebagai sebuah pesta demokrasi yang bersifat duniawi. Karena sifatnya duniawi maka pemilu sifatnya fana, tidak kekal dan merupakan permainan dunia. Sebagaimana permainan, tentu ada pihak yang menang dan kalah. Namun, masing-masing pihak tetap harus bersifat sportif. Pentingnya sifat sportif tersebut dinyatakan oleh H. Masnun Tahir yang merupakan nara sumber tunggal dalam berita. Dalam menjunjung sifat sportivitas tersebut disertakan pula sebuah

pribahasa “yang menang jangan jumawa dan yang kalah jangan kecewa” sebagai seruan sekaligus pengingat untuk menjaga persatuan pasca pemilu kepada seluruh masyarakat Indonesia.

Sedangkan KPU dan Bawaslu direpresentasikan sebagai lembaga yang bertanggungjawab, baik dalam menjalankan tugas, bekerja sesuai dengan Undang-Undang KPU, profesional dan berintegritas. Hal tersebut didasarkan pada mekanisme penyaringan panitia atau anggota KPU dan Bawaslu yang dianggap telah berjalan dengan baik, sehat dan bersih karena melalui beberapa tahapan dan tes yang cukup ketat.

Pada opini yang berjudul “Kekerasan dan Keadaban Politik Kita” juga merepresentasikan tentang penyelenggaraan pemilu 2019. Dalam opini tersebut pemilu direpresentasikan dekat atau selalu berhubungan dengan kekerasan dan konflik. Hal tersebut ditandai dengan adanya kerusuhan pada tanggal 22 Mei pasca berlangsungnya pemilu. Bahkan, beberapa pengamat Barat memberikan label kepada masyarakat Indonesia sebagai

komunitas barbar dan antihumanisme.

Meskipun pemilu direpresentasikan identik dengan kekerasan atau konflik, pihak yang bertanggungjawab adalah para kontestan pemilu, meliputi politisi, parpol, kontestan pemilu dan elit ormas. Sehingga, solusi yang diberikan oleh penulis opini tersebut terhadap pelaksanaan pemilu selanjutnya adalah bukan dengan menggantikan sistem demokrasi dengan sistem yang lain, namun memperbaiki sistem yang telah ada. Perbaikan tersebut meliputi perbaikan dari peserta, yakni dari pemilih dan kontestan pemilu serta perbaikan dari penyelenggara atau panitia. Misalnya melakukan diplomasi politik ketika terdapat masalah yang berhubungan dengan hasil pemilu, bukan dengan konflik jalanan. Setiap partai dan elit politik mengharamkan konflik jalanan, memprovokasi dan memobilisasi massa untuk melakukan aksi kekerasan. Bahkan, setiap elit politik diharuskan membuat kontrak bagi kelompok yang melakukan kekerasan massa akan

didiskualifikasi dalam pemilu mendatang.

Selanjutnya, pada berita yang berjudul “LKSB: Tujuan Demokrasi adalah Kemakmuran dan Kesejahteraan rakyat” merepresentasikan tentang demokrasi. Dalam berita yang memuat satu nara sumber, yakni Direktur Eksekutif LKSB NU, Abdul Ghopur menyatakan bahwa demokrasi merupakan alat untuk mensejahterahkan dan memakmurkan rakyat. Selain itu, demokrasi juga direpresentasikan sebagai alat pemersatu bangsa yang mengedepankan asas musyawarah. Karena demokrasi direpresentasikan sebagai alat pemersatu, maka salah jika menganggap demokrasi adalah pemicu perpecahan bangsa.

Kuncinya adalah masyarakat harus menerima perbedaan pendapat dan kebijakan pemerintah jika mendambakan persatuan. Meskipun demikian, Abdul Ghopur juga melakukan penilaian tentang demokrasi. Menurutnya, demokrasi saat ini mengalami kemunduran dalam hal substansi, namun maju secara simbolis dan ritual. Karena itu, untuk mengembalikan substansi

demokrasi, masyarakat perlu mendewasakan sikapnya terhadap demokrasi dengan cara mengetahui dan memahami secara komprehensif makna demokrasi sebagai alat kesejahteraan.

Berita selanjutnya yang berjudul “Gus Yahya: Perusuh Demokrasi Harus Diberantas” merepresentasikan tentang kelompok demonstran yang melakukan aksi kekerasan di Jakarta pada 22 Mei 2019 pasca diumumkannya hasil pilpres. Para demonstran tersebut direpresentasikan sebagai kelompok yang tidak tertib hukum, amoral, merusak tatanan sosial, berperilaku *bully*, anti Pancasila, preman bayaran dan tidak berpartisipasi dalam pelaksanaan demokrasi. KH Yahya Cholil Staquf atau yang akrab disapa Gus Yahya sebagai Narasumber tunggal berita tersebut juga mengajak seluruh warga Indonesia untuk mengucilkan kelompok demonstran atau yang direpresentasikan sebagai kelompok pem-*bully*. Selain itu, Gus Yahya juga menyeru kepada pihak aparat hukum untuk memberikan hukuman yang tegas dan imparial kepada kelompok demonstran. Berita ini

juga merepresentasikan Ormas NU sebagai kelompok yang sempurna karena akan menjadi katalisator masa depan peradaban Indonesia.

Konten terahir yang dianalisis dari website Nu.Or.Id adalah opini yang berjudul “Kita Semua adalah Pemenang dalam Pesta Demokrasi” yang merepresentasikan tentang sistem demokrasi. Dalam opini ini penulis menjelaskan tentang pentingnya menjaga persatuan pasca pemilu. Selain itu penulis juga menekankan pentingnya sikap sportifitas bagi masing masing kontestan pilpres, yakni hendaknya *legowo* bagi yang kalah dan kerja dengan sungguh-sungguh untuk melaksanakan janji-janji kampanye bagi pihak yang menang. Selain merepresentasikan sistem demokrasi, dalam opini ini juga merepresentasikan penyelenggaraan pemilu 2019. Adanya kasus meninggalnya ratusan KPPS dianggap sebagai tragedi buruk selama pelaksanaan pemilu di Indonesia. Sehingga pemilu selanjutnya harus banyak dilakukan perbaikan. Dalam hal ini, solusi yang diberikan penulis terkait penyelenggaraan pemilu 2019 adalah

memperbaiki sitem yang ada (sistem demokrasi), bukan dengan mengganti sistem tersebut.

Penulis juga menekankan pentingnya pihak oposisi dalam penyelenggaraan pemerintahan suatu negara. Namun pihak oposisi yang dimaksud adalah pihak yang melakukan kritik terhadap pemerintahan jika terjadi penyalahgunaan kekuasaan dan memberikan apresiasi terhadap keberhasilan pemerintah.

Sedangkan beberapa pilihan kosa kata atau metafora yang digunakan dalam pemberitaan di website Nu.or.id meliputi pemilu seperti permainan di dunia, masyarakat perlu melakukan hijrah dari saling bersitegang, kekerasan dalam pemilu adalah noktah hitam pada baju demokrasi, memberantas kelompok demonstran, tancap gas, memimpin orkestra kerja dan mengharamkan konflik jalanan.

Konten yang dianalisis dalam website Voa-islam.com pada Mei-Juni 2019 sebanyak 1 berita dan 4 opini. Masing-masing opini berjudul “Wajah Demokrasi Ala Drakor, Lucu atau Miris?”, “Nyawa Taruhannya Harga Mati untuk Demokrasi”,

“Demokrasi Bisa Mati, Salah Satu Indikasinya Oposisi Dituduh Makar” dan “Pecundang Ala Demokrasi”. Sedangkan berita yang akan dianalisis berjudul “Ketika Saksi Berkata Curang Bagian dari Demokrasi”.

Pada opini yang berjudul Wajah Demokrasi ala Drakor merepresentasikan sistem demokrasi sebagai sistem yang cacat dan tidak mendatangkan kemaslahatan karena tidak bersumber dari wahyu atau Al-Quran. Begitu pun pada judul opini Nyawa Taruhannya, demokrasi direpresentasikan sebagai sistem yang memegang prinsip machiavellis, sistem kapitalis dan tidak membawa berkah. Bahkan sistem demokrasi disebut sebagai sumber konflik dan masalah bagi rakyat karena penuh dengan kecurangan dalam mencapai tujuan.

Pada opini berjudul Demokrasi Bisa Mati dan Pecundang Ala Demokrasi, kedua opini tersebut juga merepresentasikan demokrasi sebagai sistem yang merampas hak rakyat, penuh kecurangan yang terstruktur, sistematis dan masif, menganut ideologi sekuler, yakni sebuah ideologi yang memisahkan

urusan agama dengan urusan kenegaraan, kapitalis, kontra terhadap pemimpin yang bertakwa atau memimpin Islam sehingga pemimpin yang terpilih dari sistem demokrasi adalah pemimpin yang tidak amanah dan culas.

Terkait representasi pemimpin culas yang terpilih dari sistem demokrasi, Fahri Hamzah yang menulis opini berjudul Demokrasi Bisa Mati dalam website voa-islam.com memberikan beberapa contoh negara-negara lain yang menganut sistem demokrasi seperti Mussolini di Italia, Hitler di Jerman, Alberto Fujimori di Peru dan Juan Peron di Argentina. Mereka dianggap sebagai pemimpin-pemimpin culas akibat terpilih dari sistem demokrasi yang dianut oleh negaranya.

Selain merepresentasikan tentang demokrasi, opini dan berita dalam website voa-islam.com juga merepresentasikan tentang pemilu, wakil rakyat dan penyelenggara pemilu atau KPU. Pada opini yang ditulis Ummu Haaris yang berjudul Nyawa Taruhannya, pemilu direpresentasikan sebagai sistem yang menagih biaya besar karena

anggaran negara yang dikeluarkan mencapai lebih dari 25 Trilyun pada pemilu 2019 dan menagih banyak nyawa seperti munculnya kasus meninggalnya ratusan KPPS dan terjadinya aksi demo di Jakarta pada 22 Mei yang juga terdapat korban meninggal dunia. Pemilu juga direpresentasikan sebagai sistem yang curang, tidak adil karena dinilai hanya melindungi satu paslon atau calon tertentu saja.

Pada opini berjudul Pecundang Ala Demokrasi yang ditulis Mila Ummu Tsabita, KPU direpresentasikan sebagai lembaga yang tidak profesional, penuh kecurangan dan tidak netral. Terkait kecurangan tersebut penulis juga mengutip beberapa ayat Al-Quran yang menjelaskan ancaman atau ganjaran bagi pemimpin yang berbuat curang dan tidak amanah. Selain KPU, wakil rakyat juga direpresentasikan sebagai pihak yang tidak memperjuangkan hak rakyat, memperkaya diri sendiri demi keuntungan pribadi. Hal itu diungkapkan oleh Rut Sri Wahyuningnsih penulis opini berjudul Wajah Demokrasi Ala Drakor. Penulis juga

membandingkan gambaran demokrasi dan wakil rakyat di Indonesia sebagaimana drama korea yang berjudul *My Fellow Citizen*.

Keempat opini dalam website voa-islam.com juga memberikan solusi untuk pembenahan sistem pemerintahan di Indonesia yakni dengan menggantikan sistem demokrasi dengan sistem politik Islam (khilafah) dan memberlakukan syariat Islam. Sistem demokrasi yang merupakan sistem buatan manusia dianggap tidak membawa kemaslahatan umat sehingga harus diganti dengan syariat Islam yang merupakan aturan dari Allah atau Tuhan semesta alam. Syariat Islam tersebut dianggap telah terbukti penerapannya selama puluhan abad dapat memperbaiki nasib umat dan membawa masyarakat pada jalan yang lurus dan benar. Untuk menegaskan pentingnya syariat Islam diterapkan di Indonesia, penulis opini mengutip beberapa ayat Al Quran sebagai dalil kebenaran.

Pada opini berjudul Pecundang Ala Demokrasi, sistem politik Islam atau khilafah direpresentasikan sebagai sistem yang lebih manusiawi dengan aturan yang sangat lengkap

dibandingkan dengan sistem demokrasi. Khilafah dianggap mampu mencegah terjadinya kecurangan dan kriminalitas karena khilafah merupakan sistem yang diridhai oleh Tuhan Allah swt.

Beberapa metafora yang digunakan untuk merepresentasikan sistem demokrasi pada website Voa-islam.com meliputi; bak pisang dikupas kulitnya, bola panas yang bergulir, nila setitik yang akan merusak air susu *sebelangga*, kecurangan yang TSM (terstruktur, sistematis dan masif) dan un-install demokrasi.

Perbedaan representasi demokrasi antara Nu.or.id dengan Voa-Islam.com menunjukkan adanya kepentingan yang berbeda dari masing-masing media islam tersebut. Nu.or.id sebagai media di bawah naungan ormas NU (Nahdlatul Ulama) yang mendasarkan ideologi pemberitaannya pada Al-Quran, sunnah, juga kemampuan akal dan realitas empirik terlihat sangat pro terhadap pemerintahan. Bahkan pemberitaannya juga memperlihatkan kecondongan ormas NU terhadap salah satu paslon pilpres 2019. Begitu pun dengan

Voa-Islam.com yang mendasarkan ideologi pemberitaannya pada Al-Quran surah An-Nahl ayat 25 dan Al-Hujurat ayat 6 terlihat sangat kontra terhadap pemerintahan dan menunjukkan keberpihakannya pada salah satu paslon pilpres . Hal tersebut dapat dilihat dari bagaimana kedua media mencitrakan pemerintahan dan calon pemimpin yang akan terpilih dari sistem demokrasi.

Melalui media massa, kedua kelompok Islam melakukan pertarungan ideologi untuk mempertahankan kuasa atas ideologi yang dipercaya. Keduanya ingin mempertahankan kuasa, mempengaruhi masyarakat melalui konstruksi citra atas wacana demokrasi, pemilu, lembaga pemerintahan dan pasangan calon presiden 2019. Bahkan kedua media tidak hanya menunjukkan identitas politiknya, namun juga identitas keislamannya. Website Nu.or.id ingin menunjukkan identitas ormas NU sebagai penganut dan pengamal Islam moderat yang mencintai kesatuan dan persatuan Indonesia atau dikenal dengan jargon NKRI harga mati. Sedangkan Voa-

islam.com sebagaimana pendapat Dr. Sri Yunanto menjadi media massa yang mewakili kelompok Islam yang menolak demokrasi dan menghendaki berdirinya negara Islam di Indonesia dengan menggunakan sistem khilafah.

Kedua kelompok tersebut menggunakan bahasa sebagai alat untuk memperkuat ideologi dan mengajak masyarakat mempercayai berita dan opini yang telah dikonstruksi. Sehingga dalam penulisan berita dan opini sering menggunakan metafora tertentu untuk memberikan perbandingan, contoh dan menarik minat serta pengetahuan masyarakat terhadap berita atau opini yang ditulis. Sebagaimana pendapat Alex Sobur bahasa mempunyai kekuatan untuk merepresentasikan realitas dan mempengaruhi makna terhadap realitas yang telah dikonstruksi yang bertujuan untuk mengarahkan persepsi masyarakat supaya sesuai dengan yang diinginkan oleh pihak penerbit berita.

Penutup

Penelitian ini menyimpulkan bahwa dari hasil analisis wacana model Norman Fairclough atas representasi demokrasi pasca pemilu 2019 pada berita dan opini yang dimuat pada website Nu.or.id dan Voa-islam.com periode Mei-Juni menunjukkan adanya representasi yang berbeda, bahkan cenderung bertolak belakang antara kedua media Islam tersebut terhadap representasi demokrasi pasca pemilu 2019.

Dari analisis bahasa pada berita dan opini kedua media Islam tersebut diperoleh beberapa kesimpulan. *Pertama*, berita dan opini pada Nu.or.id merepresentasikan sistem demokrasi sebagai sistem yang bertujuan untuk mensejahterakan dan memakmurkan masyarakat, alat pemersatu bangsa, menjunjung asas musyawarah dan mendorong masyarakat untuk membangun persatuan. Adapun solusi yang ditawarkan untuk sistem pemerintahan Indonesia adalah memperbaiki sistem yang ada dengan cara tertentu, salah satunya dengan menjadi pihak oposisi yang baik dan kritis. Sedangkan Voa-islam.com merepresentasikan sistem

demokrasi sebagai sistem yang tidak mendatangkan kemashlahatan umat karena tidak bersumber dari wahyu Tuhan atau Al-Quran, *Machiavellis* atau penuh kecurangan, kapitalis, sekuler, kontra terhadap pemimpin beragama islam dan merampas hak rakyat. Karena itu lah solusi yang ditawarkan adalah mengganti sistem demokrasi dengan sistem politik islam atau khilafah.

Kedua, perbedaan representasi tersebut menunjukkan adanya perbedaan kepentingan media, perbedaan identitas politik dan identitas keislaman sebagai kelompok Islam moderat dan kelompok Islam radikal. Kedua media bertarung untuk memperebutkan wacana tentang demokrasi di media online dan mengarahkan persepsi masyarakat sesuai dengan yang diinginkan oleh pihak media tersebut. Maka yang terjadi selanjutnya adalah kedua media tidak hanya melakukan konstruksi citra terhadap demokrasi, namun juga melakukan pertarungan wacana atas demokrasi. Penelitian ini juga memperkuat pandangan bahwa tidak ada media yang netral yang bebas dari kepentingan apa pun.

Karena pada dasarnya, setiap media massa (cetak, elektronik dan media sosial) baik yang dikelola oleh ormas Islam atau dikelola secara konvensional membawa kepentingan-kepentingan politik, ekonomi, identitas agama dan identitas golongan.

DAFTAR RUJUKAN

Buku

Eriyanto, 2011. *"Analisis Wacana"*. Yogyakarta: Lkis.

Yunanto, Sri., 2018. *"Islam Moderat Vs Islam Radikal"*, Yogyakarta: Medpress.

Zuhro, R Siti., dkk, 2009. *"Demokrasi Lokal"*, Yogyakarta: Ombak.

Artikel Jurnal

Arnus, Sri, Hadijah., 2018. *Pers Islam di Era Konvergensi Media*. Jurnal Palita, Vol. 1 (2) 2018.

Aziz, Mohamad, Abdul., 2018. *Media Massa Islam dalam Tantangan Global*. Jurnal Komunikasi Islam. Vol. 2 (2)2018.

Fahmi, Muhammad., 2018. *Diskursus Islam Nusantara dalam Representasi Media Massa*. Jurnal Komunikasi Islam, Vol. 7 (1) 2018.

Iftitah, Naili, Rohmah., 2014,
Islam dan Demokrasi, Jurnal
Islamuna Vol. 1 (1) 2014,
IAIN Madura.

Mahdi, Acan., 2015, *Berita
sebagai Representasi Ideologi
Media*. Jurnal Al-Hikmah,
Vol. 9(2)2015.

Sulaiman, Adhi, Iman., 2010,
*Dilema Elite Politik dan
Kekuatan Media Massa*. Jurnal
MIMBAR, Vol. XXVI (2)
2010.